



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCAIRAN DAN  
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Juni 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.25 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022; 2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.
Ketua Rapat	: H. Syaifullah Tamliha, S.Pi.,M.S
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: .... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi DDTT, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2022.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II.KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan percepatan realisasi TA 2022.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023, sebagai berikut:

*Dalam Ribu Rupiah*

NO.	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2023	PAGU INDIKATIF TA 2023	SELISIH/ BACKLOG
		A	B	A-B
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;	1.814.685.160	232.922.160	1.581.763.000
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	487.384.248	211.470.248	275.914.000
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	207.976.634	93.628.634	114.348.000
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	422.652.143	258.286.559	164.365.584

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2023, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023.

4. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menunda bagi yang belum melaksanakan proses transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks PNPM Mandiri pedesaan menjadi Bumdesma.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 2 Juni 2022

KETUA RAPAT,



SYAIFULLAH TAMLIHA

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



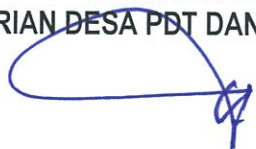
SUGITO

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN  
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI




HARLINA SULISTYORINI

DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



EKO SRI HARYANTO

Pit. DIRJEN PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



RAJUMBER PRIHATIN